

## **PERAN KEPEMIMPINAN PJ WALIKOTA RATU DEWA TERHADAP PREMANISME DI KAWASAN WISATA KOTA PALEMBANG**

**M. Sutarman<sup>1</sup>, Taufik Akhyar<sup>2</sup>, Deany Afriany<sup>3</sup>**

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>123</sup>

Email: [mhmmmdstrmn@gmail.com](mailto:mhmmmdstrmn@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by Ratu Dewa's leadership as Acting Mayor of Palembang who was able to carry out his role in overcoming the phenomenon of thuggery that occurred in the tourist area of Palembang City, precisely at Kuto Besak Fort and Ampera Bridge, which disturbed the surrounding community, especially tourists. This phenomenon is related to the leadership role of the acting mayor of Palembang (Queen Dewa) in committing to providing comfort and security for tourists visiting the city of Palembang. Meanwhile, data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The primary data sources in this research are the secretary of the Palembang City Civil Service Police Unit, and the tourist destination manager. Secondary data comes from books, journals and other written sources. In analyzing research using Role theory according to Mintzberg. The results of the research show that Ratu Dewa as a leader in overcoming acts. The results of the study indicate that Ratu Dewa as the Acting Mayor of Palembang carries out his role as the Acting Mayor with an interpersonal role. Ratu Dewa as a leader is able to direct the security team to provide direction to Danru, Kasi, Kabid by providing direction to each personnel for guidance from the center to maintain security. Relationship with information (informational role) Ratu Dewa openly obtains information from complaints from local people and tourists, and directly reviews the location of BKB and Ampera Bridge as one of the areas with thuggery. The role of decision-making (decisional role) Ratu Dewa designs the establishment mechanism by establishing an integrated post to carry out supervision carried out for 24 hours or operating for 24 hours..*

**Keywords:** *Actions of Thuggishness, Tourist Destinations, Leadership Role.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kepemimpinan Ratu Dewa sebagai PJ Walikota Palembang yang mampu melaksanakan perannya dalam mengatasi fenomena aksi premanisme yang terjadi dikawasan wisata Kota Palembang tepatnya di Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera, yang meresahkan masyarakat sekitar, terutama wisatawan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini adalah sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, dan pengelola destinasi wisata. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Dalam menganalisis penelitian menggunakan teori Peran menurut Mintzberg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratu Dewa sebagai PJ Walikota Palembang menjalankan perannya sebagai PJ Walikota dengan peran antar pribadi (*interpersonal role*) Ratu Dewa sebagai pemimpin mampu mengarahkan tim keamanan memberikan arahan kepada Danru, Kasi, Kabid dengan memberikan arahan dengan setiap personil untuk bimbingan dari pusat untuk menjaga keamanan. Hubungan dengan informasi (*informational role*) Ratu Dewa secara terbuka memperoleh informasi dari keluhan masyarakat lokal

maupun wisatawan, dan melakukan secara langsung meninjau lokasi BKB dan jembatan ampera sebagai salah satu wilayah dengan aksi premanisme. Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*) Ratu Dewa merancang mekanisme pendirian dengan mendirikan posko terpadu guna melakukan pengawasan yang dilakukan selama 24 jam atau beroperasi selama 24 jam.

**Kata Kunci:** Aksi Premanisme, Destinasi Wisata, Peran Kepemimpinan

## **PENDAHULUAN**

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi adalah maraknya aksi atau praktik premanisme di kalangan masyarakat. Menurut Anton dalam S. Budhi Raharjo istilah preman berasal dari kata *freeman* yang mengarah pada arti orang yang bebas (Raharjo, 2012). Tingkat perkembangan perilaku dari premanisme semakin mengarah pada hal negatif karena dianggap sebagai tindak kekerasan dan kriminal. Fenomena premanisme tidak dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan saja, namun juga mengarah pada korban dari sosial ekonomi yang tidak layak (Mustamant, 2013).

Kota Palembang tidak terlepas dari fenomena premanisme terutama di daerah kawasan wisata. Kasus terbaru pada awal tahun 2024 terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang preman yang berwujud sebagai pengamen di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB). Hal ini berawal dari datangnya bus pariwisata dari Lampung yang tidak memberikan uang pada saat pelaku mengamen yang berakhir dengan aksi pelaku meludahi salah satu penumpang. Aksi ini kemudian menyebar luas di platform media sosial (Siregar, 2024)

Dengan adanya fenomena ini menjadi sorotan masyarakat hingga ke pemerintah daerah, yang kemudian PJ walikota Ratu dewa terhadap komitmen memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan di kota Palembang. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 jo. Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Peraturan yang memuat mengenai penyelenggaraan pariwisata termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengembangan Destinasi Wisata. Dalam penangannya Wali Kota akan dibantu oleh Tim keamanan yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang. Dengan banyaknya kasus penodongan serta premanisme yang didapatkan oleh pariwisata yang sedang berkunjung ke kota Palembang terutama di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) dan jembatan Ampera.

Kasus ini sangat mencoreng nama baik kota Palembang, dan membuat para

wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang menjadi takut. Kasus penodongan yang dialami oleh salah satu pariwisata perempuan yang merupakan *tour guide* yang sedang mengajak turis atau kliennya berwisata dan berfoto-foto di icon kota Palembang yaitu jembatan ampera. Dimana saat ia sedang berjalan, wanita itu diikuti oleh pria bertopi dan berjaket memaksa meminta sejumlah uang dengan memegang pisau di tangan kanannya. Kejadian itu terjadi pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Kasus pemalakan yang terjadi di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang yang dilakukan oleh sekelompok preman kepada supir dan kernet bus yang membawa wisatawan ibu-ibu pengajian asal Lampung, Kejadian ini dialami oleh ayah dan anak yang berprofesi sebagai sopir dan kernet bus asal Lampung yang dikeroyok oleh preman di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang. Korban pun langsung melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang. Kepada polisi, keduanya menuturkan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat 3 November 2023 sekitar pukul 18.00. Kejadian itu bermula ketika mereka membawa rombongan ibu-ibu pengajian asal Lampung berwisata ke Benteng Kuto Besak (BKB) di jalan SMB Kelurahan 19 ilir kecamatan IB I, Palembang.

Selain Benteng Kuto Besak (BKB), aksi premanisme juga terjadi di Kawasan Jembatan Ampera di mana salah seorang wisatawan wanita diancam menggunakan senjata tajam (sajam) oleh preman. Peristiwa itu terjadi saat kurang lebih 40 wisatawan hendak pulang menuju busnya dekat Masjid Agung Palembang. Kemudian, kasus pemalakan Aksi premanisme di sekitar Jembatan Ampera Palembang kembali terjadi. Seorang sopir angkot dianiaya karena tidak memberikan uang yang diminta pelaku.

Kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB) yang jadi ikon kota Palembang sering dirasakan dengan hadirnya pengamen. Keresahan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah kota (Pemkot) Palembang bersama aparat kepolisian dengan berhasil mengamankan pengamen yang melakukan aksi nekat masuk kedalam bus wisatawan dan menadahkan tangan meminta uang, namun tidak diberikan uang sehingga membuat kesal dan meludahi guide wisatawan tersebut.

Dengan adanya permasalahan di atas menjadi sorotan publik terutama pemerintah daerah, Ratu dewa sebagai PJ Walikota Palembang memberikan respon yang luar biasa dan berdedikasi terhadap fenomena premanisme ini, aksi ini dianggap sebagai penoda dari keamanan di Kota Palembang hingga memprihatinkan, hingga Ratu Dewa memberikan komitmen penuh dan akan terus berusaha menjaga keamanan Kota Palembang yang dibantu

oleh pihak lain yang berwenang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi, yakni nilai yang belum terungkap, sehingga dalam penelitian, peneliti bertindak instrumen kunci. (Sugiyono, 2018) lingkup penelitian ini adalah sejauh mana peran Pj walikota Ratu Dewa terhadap komitmen memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pariwisata di kota Palembang. Penelitian kualitatif sebuah metode penelitian untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya sebuah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, penelitian secara keseluruhan dilakukan di Kota Palembang.

Adapun data yang terdapat dalam penelitian bersumber dari data primer merupakan data utama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang dilakukan dengan mewawancarai informan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Misalnya, yang diperoleh peneliti dari buku-buku, internet, jurnal, berita dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul Peran Pj Walikota Ratu Dewan Terhadap Komitmen Memberikan Kenyamanan dan Keamanan Pariwisata di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Macam-macam teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan cara mengorganisasikan data memilih mana yang penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Milles, 2014). Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data yang telah terkumpul. Tahap-tahap yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Peran Kepemimpinan Walikota terhadap Premanisme di Kawasan Wisata Kota Palembang**

#### **1. Peranan yang Memiliki Hubungan Pribadi (*Interpersonal Role*)**

Dalam mewujudkan peran kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan hal yang berkaitan dengan otoritas serta status untuk dapat memberikan arahan atau motivasi kepada hal yang memiliki kaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal tersebut akan berkaitan dengan peran pribadi dari pemimpin, yang menjalankan perannya sebagai pemimpin dan pejabat perantara (Setiawan, 2017).

Aksi premanisme sebagai suatu tindakan yang meresahkan ketentraman masyarakat yang terlahir dari adanya suatu alasan sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan premanisme. Dengan adanya fenomena premanisme di suatu wilayah akan berkaitan dengan peran pribadi seorang pemimpin. Seperti halnya yang terjadi wilayah destinasi Kota Palembang yaitu Benteng Kuto Besak (BKB) dan Ampera yang kerap kali terjadi aksi premanisme seperti pemalakan yang dikaitkan dengan keberadaan sosok pemimpin yaitu PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa. PJ Ratu Dewa menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin dalam mengatasi aksi premanisme di Kota Palembang yang sempat menghebohkan.

Peran pribadi sebagai pemimpin (*Leader*) terlihat dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi dan mengarahkan tim keamanan Kota Palembang sebagai bawahan untuk turut serta secara langsung melakukan peninjauan ke lokasi destinasi wisata yang terjadi aksi premanisme. Peran pribadi sebagai pemimpin memiliki kaitan erat dengan bimbingan, arahan, motivasi untuk menciptakan suatu kondisi dimana memberikan dukungan kinerja pada bawahannya. Dalam memberikan arahan tersebut PJ Ratu Dewa melibatkan bawahannya seperti Danru, Kasi, Kabid dengan memberikan arahan dengan setiap personil untuk bimbingan dari pusat.

Peran sebagai pemimpin dalam indikator peran pribadi melibatkan pribadi dari sosok pemimpin sebagai kepribadian yang memiliki pengaruh yang besar untuk wilayah yang dipimpinnya. Dalam hal ini dikaitkan dengan sifat atau watak yang dimiliki oleh Ratu Dewa sebagai PJ Walikota dalam menangani aksi premanisme di beberapa kawasan wisata Kota Palembang. Kepemimpinan Ratu Dewa menunjukkan bahwa adanya sebuah keunggulan yang menyebabkan kepemimpinan beliau mempengaruhi bawahan.

Peran pemimpin sebagai pejabat perantara yang dimaksud adalah seorang pemimpin

yang melakukan perannya dengan interaksi kepada bawahan atau staf hingga orang lain yang berada di luar organisasinya untuk mendapat sebuah keterangan mengenai informasi tertentu (Trioctavia, 2016). Pada dasarnya pemimpin yang turut menjalankan perannya sebagai pejabat perantara dapat melakukan hubungan dengan memberikan berbagai solusi dari suatu permasalahan. Dalam hal ini PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan peran sebagai pejabat perantara dengan menerima informasi terkait aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang, secara terbuka kepada seluruh masyarakat.

Peran sebagai pejabat perantara penting dilakukan oleh seorang pemimpin untuk turut menjalin hubungan dengan semua kalangan. Hal ini dilakukan agar pemimpin dapat menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan segala fenomena yang meresahkan yang terjadi di wilayah kekuasaannya seperti halnya aksi premanisme yang terjadi di kawasan wisata Kota Palembang. PJ Ratu Dewa tidak hanya menerima keluhan dari bawahannya melainkan juga dari masyarakat setempat dan masyarakat wisatawan. Sehingga kawasan yang dimaksud mendapat perhatian lebih oleh PJ Walikota dan pihak keamanan lainnya.

Peran antar pribadi (*interpersonal role*) dalam peran kepemimpinan harus melihat tindakan dari pemimpin dalam berbagai situasi atau keadaan yang akan menjadi penghubung antara pihak satu dengan pihak yang lain dalam mengatasi permasalahan. Peran antar pribadi dari kepemimpinan dapat diukur berdasarkan indikator perannya sebagai pemimpin merujuk pada sikap, ketegasan, dan karakteristik, serta indikator peran pejabat perantara yang mengarah pada kemampuan pemimpin untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Toby Samuel Tampubolon (2024), peran pribadi yang dimiliki oleh pemimpin merujuk pada adanya hubungan untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu lingkungan wisata untuk menjalankan visi dan misi dari destinasi wisata suatu tempat. Adanya komunikasi yang terjalin baik antara pemimpin dengan bawahan sebagai bukti bahwa adanya peran pribadi yang dilibatkan dalam suatu kepemimpinan. Salah satu cara yang dinilai efektif untuk melihat bahwa seorang pemimpin menjalankan peran pribadinya kepada bawahan dengan melihat aktivitas apel rutin untuk menyampaikan ide atau gagasan seorang pemimpin (Tampubolon, 2024).

## **2. Peranan yang memiliki hubungan dengan informasi (*informational role*)**

Dalam pelaksanaan peran kepemimpinan tidak akan terlepas dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin untuk dapat memperhatikan wilayah yang dipimpinnya dengan berbagai program untuk dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pemimpin akan

melakukan hubungan untuk memperoleh informasi dari luar, informasi yang telah diperoleh harus dikelola kemudian dibagikan kepada pihak yang dianggap terlibat. Maka dari itu, sosok pemimpin selain menjalankan perannya hubungan antar pribadi juga memiliki peran dalam mengelola informasi (Setiawan, 2017).

Pemimpin memiliki peran dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang mengarah pada ketentraman suatu wilayah kekuasaannya. Dalam memperoleh informasi pemimpin melakukan berbagai hal sesuai dengan karakteristik kepemimpinannya. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara terbuka memperoleh informasi dari keluhan masyarakat lokal maupun wisatawan, dengan adanya keluhan tersebut sebagai seorang pemimpin PJ Ratu Dewa pernah secara langsung meninjau lokasi Benteng Kuto Besak sebagai salah satu wilayah dengan aksi premanisme.

Pemimpin sebagai pengumpul informasi atau penerima informasi dan memiliki suatu kemampuan untuk dapat melakukan suatu pengembangan mengenai aksi premanisme di kawasan BKB dan ampera dan akan memahami secara utuh mengenai lingkungan tersebut. Pemimpin pemegang kekuasaan suatu wilayah harus menyadari akan perannya untuk dapat memperoleh informasi dalam segala hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini akan menunjukkan adanya kesiapan dari yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan peran kepemimpinannya dalam suatu kekuasaan dalam wilayah.

Setelah memperoleh informasi, pemimpin harus memiliki kesadaran akan perannya dalam mengelola informasi tersebut. Pengelolaan disini mengarah pada rancangan perencanaan dalam mengatasi aksi premanisme yang terjadi di kawasan wisata BKB dan Jembatan Ampera. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa selama menjabat sebagai seorang pemimpin telah mampu mengelola informasi yang mengarah pada perencanaan hingga pelaksanaan dalam mengatasi aksi tersebut.

Kemampuan dalam mengelola informasi mengenai aksi premanisme di kawasan BKB dan Jembatan Ampera telah dilakukan oleh PJ Ratu Dewa dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Hasil dari pengelolaan tersebut untuk wilayah BKB dan Ampera sebagai destinasi wisata Kota Palembang semakin terjaga dan diperhatikan, karena memiliki nilai jual kepada wisatawan dengan memberikan kenyamanan dan ketenangan atau terhindar dari aksi premanisme dalam bentuk apapun.

Selain menjalankan peran untuk memperoleh informasi, seorang pemimpin juga memiliki peran untuk menyebarkan informasi. Dalam penelitian ini indikator tersebut digunakan untuk melihat PJ Walikota Ratu Dewa sebagai pemimpin menjalankan perannya

untuk dapat menyebarkan informasi atau memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat mengenai aksi premanisme di kawasan wisata BKB dan Ampera.

Hail temuan dapat tergambarkan PJ Ratu Dewa dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan menyebarkan informasi secara cepat kepada pihak keamanan yang memiliki kaitan erat untuk membantu mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang terutama di BKB dan Ampera. Kemudian, terdapat hasil wawancara kepada Lukman salah satu pengelola tempat di Benteng Kuto Besak mengenai penyebaran informasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Palembang.

PJ Walikota Palembang Ratu Dewa telah menyebarkan informasi mengenai aksi premanisme di kawasan wisata BKB dan Jembatan Ampera, dalam penyebaran informasi tersebut tetap melibatkan peran dari tim keamanan dan pengelola tempat wisata. Hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas terhadap informasi dari hasil pengelolaan informasi yang dilakukan oleh PJ Ratu Dewa hingga banyak yang terlibat dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan ini sebagai usaha untuk berlangsung secara efektif.

Peranan yang memiliki hubungan dengan informasi (*informational role*), merupakan sebuah harapan secara kontinu untuk mampu memperoleh informasi mengenai aksi premanisme dengan berbagai sumber dan akan berjalan dengan baik melalui tahapan pertemuan kepada masyarakat sebagai keluhan ataupun dilakukan pada saat observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh Ratu Dewa. Dari adanya informasi yang telah diperoleh sebagai seorang pemimpin Ratu Dewa menjalankan perannya dalam mengelola informasi atau menganalisis masalah yang terjadi dan mencari peluang-peluang untuk melakukan tindak lanjut terhadap aksi premanisme.

Informasi yang telah diperoleh mengenai aksi premanisme baik itu yang bersifat aktual atau yang berhubungan dengan preferensi masyarakat akan mempengaruhi peran pemimpin. Sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak lain atau kelompok lain yang memiliki wewenang yang sesuai dengan peraturan daerah dan bagian dari struktur organisasi kepemimpinan PJ Ratu Dewa. Sebagai seorang pemimpin PJ Ratu Dewa telah bertindak dan memosisikan dirinya sebagai bagian dari pusat informasi sehingga dapat menyaring dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata dapat terlaksana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Daswati (2021) dalam jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik mengatakan bahwa peran kepemimpinan merupakan suatu konsep seseorang

dapat mengembangkan suatu posisi atau tempat untuk dapat melaksanakan peranan dengan berbagai informasi dan peraturan yang ada. Peran kepemimpinan merupakan wujud dari sosok pemimpin yang memiliki kredibilitas serta ingteritas yang memadai berperan dalam memberikan pergerakan informasi kepada pengikut dilanjutkan dengan pergerakan-pergerakan untuk mengatasi suatu permasalahan (Daswati , 2021).

Dalam ranah kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalankan perannya tidak dapat berlaku secara individual melainkan harus melibatkan kelompok lain yang biasa dikenal dengan bawahan dalam kepemimpinan organisasi atau wilayah yang luas. Dalam menjalankan peran dalam mengelola informasi pemimpin membutuhkan peran dari bawahan karena untuk melakukan pekerjaan dengan efisien, efektif, dan produktif. Dalam penelitian ini PJ Wali Kota Palembang melibatkan tim keamanan dan pengelola tempat sebagai bagian dari respon terhadap informasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang terutama di Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera.

### **3. Peranan yang Memiliki Hubungan Pengambilan Keputusan (*decisional role*)**

Peranan pengambilan keputusan sebagai peranan yang sulit dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan program untuk masyarakat. Pengambilan keputusan berkaitan dengan pembuatan strategi yang akan digunakan dalam mengatasi sesuatu (Setiawan, 2017). Dalam pengambilan keputusan pemimpin mengenai ketertiban dan keamanan harus terlibat secara langsung dan hal ini berkaitan dengan fungsi dari pemimpin, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 jo. Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin akan memiliki atau melibatkan intuisi, logika, serta tahapan proses data, informasi atau fakta yang ada untuk dilanjutkan sebagai kerangka dalam perencanaan mengatasi suatu hal. Dalam penelitian keputusan yang ditetapkan oleh PJ Ratu Dewa dalam perencanaan hingga pelaksanaan dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang.

Pengambilan keputusan sebagai salah satu bagian yang bersifat integral dari kepemimpinan. Adanya keputusan sebagai fungsi dari peran pemimpin untuk mencapai tujuan dalam suatu kepemimpinan, tujuan tersebut tidak terlepas dari kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. sebagai bagian dari suatu proses, penyusunan strategi merupakan bagian dari keputusan dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata kota Palembang.

Hasil temuan, adanya strategi untuk mengatasi aksi premanisme merupakan bagian dari peran pengambilan keputusan Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang dengan

merancang mekanisme pendirian dengan mendirikan posko terpadu guna melakukan pengawasan yang dilakukan selama 24 jam atau beroperasi selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai keamanan dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat yang melakukan kunjungan wisata. Strategi selanjutnya berkaitan dengan keputusan mengenai sanksi tegas yang diberikan kepada oknum pelaku pelanggaran seperti pemalakan, pemerasan, dan pungli, bahkan penodongan. Pihak Pemkot telah menyiapkan beberapa tempat hingga setelahnya akan dilakukan pembagian personel. Sebagai suatu yang bersifat dinamis pengambilan keputusan yang dalam perencanaan strategi telah melalui berbagai pertimbangan dan memperhatikan seksama yang terlibat.

Penanganan gangguan berkaitan dengan kemampuan peran pemimpin dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut akan berhubungan dengan banyak pihak yang terlibat, dengan melibatkan pihak tersebut tentu membutuhkan keputusan dengan berbagai pertimbangan. Penanganan gangguan aksi premanisme sebagai hasil kerja lanjutan dari pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PJ Ratu Dewa yang berkaitan dengan aksi premanisme adalah mengarah pada keamanan kawasan wisata. Seperti halnya yang telah diuraikan pada wawancara di atas adanya aksi premanisme berupa pemalakan yang terjadi memberikan keputusan pemimpin untuk lebih memperhatikan ketertiban wilayah dan ketentraman bagi wisatawan. Dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh PJ Wali Kota dengan tetap memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku di daerah wilayah kekuasaannya.

Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan PJ Ratu Dewa telah melakukan berdasarkan peraturan daerah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam pengambilan keputusan masih berkaitan dengan peraturan yang berlaku, tidak dilakukan hanya berdasarkan pola pikir individual, tetap harus berdasarkan pada peraturan daerah tempat wilayah kekuasaan. Sebagai bagian dari peran yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam mengambil keputusan, bentuk penanganan sebagai hasil dari pemecah aksi premanisme yang harus dilakukan dengan berbagai unsur perencanaan.

Pengambilan keputusan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis mengenai suatu permasalahan, dengan melalui pengumpulan data atau informasi dalam menentukan alternatif yang akan dihadapi untuk dapat mengambil tindakan. Keputusan akan berisi rangkaian dari tindakan dalam melakukan analisis dalam permasalahan. Proses dari analisis tersebut akan berakhir pada sebuah kesimpulan berupa pengambilan keputusan

sebagai bahan pertimbangan. Keputusan sebagai suatu proses akhir dari adanya pemikiran yang digunakan sebagai tujuan pemecah masalah.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum Herbert Simon telah mengklasifikasikan tipe pengambilan keputusan yang biasanya digunakan oleh pemimpin. Pertama, keputusan yang terprogram, merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin dengan memperhatikan prosedur, aturan, dan kebiasaan. Keputusan ini akan berlangsung secara terus menerus atau berulang-ulang (Kusnadi, 2015). Setiap organisasi pemerintahan termasuk Pemkot telah memiliki berbagai kebijakan baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan mempermudah pemimpin dalam mengambil keputusan untuk situasi yang terjadi, seperti dalam penelitian ini pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PJ Walikota untuk menangani aksi premanisme. Kedua, keputusan tidak terprogram yang merupakan keputusan yang tidak tersusun, keputusan ini masih membutuhkan penanganan khusus baik itu mengarah pada pengalaman atau intuisi dari sosok pemimpin yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.

Sedangkan dari aspek ruang lingkup kepemimpinan, pengambilan keputusan ini telah terbagi menjadi dua seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu keputusan strategi dan keputusan operasional. Keputusan strategi dapat berlaku jangka panjang, sebagai perencanaan yang dilakukan dengan skala besar, yang berarti dalam perencanaan harus dilakukan dengan dasar tujuan masa depan. Keputusan strategi pada penelitian ini mengarah pada strategi yang ditetapkan oleh Ratu Dewa untuk mengatasi aksi premanisme yaitu dengan strategi pendirian posko keamanan di beberapa titik, pemberlakuan sanksi pada pelaku aksi premanisme terutama pada aksi tindak pidana yang menggunakan senjata tajam, dan strategi pembinaan personel tim keamanan. Sedangkan, keputusan operasional merupakan bentuk implementasi dari keputusan strategi, pada penelitian ini pengambilan keputusan operasional berupa keputusan penetapan dengan melibatkan kinerja dari pihak keamanan yaitu pihak kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada pertimbangan dan peraturan yang berlaku, dan mengacu pada informasi yang relevan. Selain itu, keputusan yang diambil harus dapat mempertimbangkan dampak yang terjadi yang diharapkan menjadi dampak positif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Smedes (1995) yang mengatakan bahwa dalam menganalisis informasi sampai pada tahap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Dampak yang terjadi dengan adanya

keputusan yang diambil oleh PJ Ratu Dewa adalah berdampak positif yaitu berkurangnya aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang terutama BKB dan Jembatan Ampera.

Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran dalam pelaksanaan tugasnya yang dikenal dengan peran kepemimpinan, berdasarkan pada teori peran dari Mintzberg, peran antar pribadi yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Palembang Ratu dewa dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata adalah dengan menunjukkan sikap kepemimpinan yang dimiliki yang mengarah pada kemampuannya untuk dapat memimpin bawahan dan melibatkan bawahan dalam mengatasi hal tersebut. Dengan adanya hal ini, telah menunjukkan sebuah gambaran bahwa peran pribadi yang dilakukan oleh Ratu Dewa sebagai seorang pemimpin telah terbentuk dengan melibatkan kinerja dari bawahannya dengan cara mengarahkan, memotivasi, dan melakukan kontrol secara langsung.

Dalam peran terdapat sebuah perilaku yang berasal dari individu untuk melakukan peran, dalam penelitian ini adalah peran dari PJ Walikota Palembang Ratu Dewa, peran tersebut berisikan perilaku aktual berupa kesadaran Ratu Dewa sebagai PJ Walikota Palembang untuk dapat melakukan tindakan atau perilaku yang sesuai dengan fungsi kewenangannya sebagai pemimpin, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai sajian peran yang bersifat dramatis berupa adanya tindakan premanisme di kawasan wisata Kota Palembang Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera. Sehingga, peran yang terlihat berupa perilaku atau tindakan dari Ratu Dewa untuk menangani premanisme di kawasan tersebut dengan beberapa peran yang dapat terlihat antara lain peran antar pribadi, peranan informasi, dan peranan pengambilan keputusan.

Dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh Ratu Dewa sebagai walikota, berdasarkan pengakuan dari masyarakat sekitar terutama pedagang tingkat kunjungan wisatawan di Benteng Kuto Besak dan Ampera mulai kembali meningkat karena tingkat keamanan yang membaik dan kejelasan tarif parkir yang ditetapkan oleh keputusan walikota.

Dari hasil wawancara tersebut, keadaan BKB dan Ampera kembali ramai dikunjungi oleh wisatawan dan pedagang mulai aktif kembali, hal ini merupakan hasil dari peran antar pribadi PJ Ratu Dewa dengan adanya arahan yang jelas kepada bawahan untuk menciptakan keamanan di kawasan Benteng Kuto Besak dan Ampera, hal ini telah terbukti dengan kemampuan para aparat keamanan untuk menjaga ketentraman wilayah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Ratu Dewa, meskipun hal ini terjadi secara bertahap namun untuk pemalakan yang dilakukan oleh oknum juru parkir dan pengamen mulai berkurang karena adanya penjagaan selama 24 jam oleh tim keamanan. Selain itu, dari peran berkaitan

dengan informasi dengan kemampuan Ratu Dewa dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi mengenai aksi premanisme tersebut, sehingga aksi ini dapat diatasi dengan peran pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mengambil keputusan mengenai strategi dan implementasi operasional.

Peran antar pribadi (*interpersonal role*) dalam peran kepemimpinan harus melihat tindakan dari pemimpin dalam berbagai situasi atau keadaan yang akan menjadi penghubung antara pihak satu dengan pihak yang lain dalam mengatasi permasalahan. Peran antar pribadi dari kepemimpinan dapat diukur berdasarkan indikator perannya sebagai pemimpin merujuk pada sikap, ketegasan, dan karakteristik, serta indikator peran pejabat perantara yang mengarah pada kemampuan pemimpin untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan.

Peranan yang memiliki hubungan dengan informasi (*informational role*), sebagai peran kepemimpinan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang bersifat interpersonal yang berarti pemimpin sebagai seorang atasan meletakkan posisinya untuk dapat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada semua kalangan mulai dari bawahan hingga ke masyarakat luas. Dalam mengumpulkan informasi Ratu Dewa menerima secara langsung aduan dari masyarakat dan menerima melalui sosial media, kemudian setelah menerima informasi mengenai adanya aksi premanisme di kawasan wisata tersebut Ratu Dewa melakukan observasi langsung ke lokasi yang didampingi dengan tim keamanan. Ratu Dewa telah berperan sebagai pemantau dalam menjalankan perannya yang berhubungan dengan informasi yang mampu melakukan identifikasi kepada seorang individu untuk menjadi pemimpin yang mampu mengumpulkan informasi dan menerima informasi mengenai aksi premanisme.

Informasi yang diterima oleh Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang merupakan informasi yang berasal dari luar organisasi atau *external events* yaitu informasi yang berasal dari luar organisasi kepemimpinan yaitu keresahan masyarakat atau wisatawan mengenai salah satu lokasi di wilayah pimpinannya yaitu Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera sebagai destinasi wisata atau tempat yang memiliki nilai jual kepada wisatawan. Kemudian, dalam menjalankan perannya yang berhubungan dengan informasi Ratu Dewa telah mampu mengolah dan menganalisis informasi tersebut yang berasal dari laporan masyarakat hingga dilakukan penyebaran untuk mewaspadai aksi tersebut kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan informasi memiliki kecenderungan oleh seorang pemimpin untuk membutuhkan tempat sebagai sasaran untuk dapat mengembangkan atau mengatasi informasi

yang telah diterima dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk membantu mengatasi hal tersebut. Adanya sebuah tekanan seorang pemimpin harus menerima informasi yang memberikan akibat besar dalam wilayah pimpinannya seperti yang terjadi di kawasan wisata BKB dan Jembatan Ampera yang mendapat respon negatif dari masyarakat luar atau wisatawan karena ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh banyaknya pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), sebagai bagian dari peran kepemimpinan PJ Walikota Palembang Ratu dewa telah mampu melaksanakan perannya dalam pengambilan keputusan mengenai aksi premanisme dengan cara mengambil keputusan mengenai strategi dan implementasi operasional. Perencanaan strategi yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak keamanan untuk mendirikan posko di beberapa titik lokasi wisata untuk memaksimalkan pengawasan terhadap aksi premanisme, strategi dilanjutkan dengan penyebaran tim keamanan yang beroperasi selama 24 jam dengan pergantian sif dari tim keamanan.

Kemudian untuk pengambilan keputusan dalam penanganan Ratu Dewa secara langsung melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP dan telah keputusan untuk melakukan hal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam pengambilan keputusan masih berkaitan dengan pertauran yang berlaku, tidak dilakukan hanya berdasarkan pola pikir individual, tetap harus berdasarkan pada peraturan daerah tempat wilayah kekuasaan. Sebagai bagian dari peran yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam mengambil keputusan, bentuk penanganan sebagai hasil dari mengatasi aksi premanisme yang harus dilakukan dengan berbagai unsur perencanaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepemimpinan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa terhadap aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang yang dianalisis dengan menggunakan teori peran menurut Mintzberg, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa PJ Walikota telah memenuhi peran kepemimpinan yaitu: Pertama peran antar pribadi (*interpersonal role*) sebagai pemimpin mampu mengarahkan tim keamanan memberikan arahan kepada Danru, Kasi, Kabid dengan memberikan arahan dengan setiap personil untuk bimbingan dari pusat untuk menjaga keamanan. Kedua, hubungan dengan informasi (*informational role*) secara terbuka memperoleh informasi dari keluhan masyarakat lokal

*M. Sutarman, Taufik Akhyar, Deany Afriany, Peran Kepemimpinan PJ Walikota Ratu Dewa terhadap Premanisme di Kawasan Wisata Kota Palembang, JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.1, April 30, 2025*

maupun wisatawan, dengan adanya keluhan tersebut sebagai seorang pemimpin pernah secara langsung meninjau lokasi Benteng Kuto Besak sebagai salah satu wilayah dengan aksi premanisme. Ketiga, peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), Wali Kota Palembang dengan merancang mekanisme pendirian dengan mendirikan posko terpadu guna melakukan pengawasan yang dilakukan selama 24 jam atau beroperasi selama 24 jam.

## **REKOMENDASI**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran, antara lain: Pertama, untuk pemimpin untuk menyadari akan peran kepemimpinan terutama dalam mengatasi aksi premanisme. Kedua, untuk peneliti selanjutnya, lebih baik dalam melakukan pengumpulan data terutama mengenai peran antar pribadi pemimpin dan melihat lebih dalam hubungan antara pemimpin dengan bawahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daswati. (2024). Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi.. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4 (1)
- Milles, Matthew. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mustamant, Mugi. (2013). *Kamus Sosiologi*. Bandung: CV. Titian Ilmu.
- Raharjo, Budhi S. (2012). *Anton Medan: Aku Bukan Penjahat*. Jakarta: Anton Medan Center.
- Setiawan, Andri. (20017). “Analisis Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Komitmen Organisasional Karyawan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, Kawi).” *Jurnal Administrasi Bisnis* 50(6).
- Siregar, H. Coy. (2024). “Mengapa Preman Palembang Lihat Wisatawan Seperti Mangsa?” *Radartv.Disway.Com*.
- Sugiyono. (2018). *Metde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, Toby Samuel. (2024). Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Margasatwa Ragunan. *Indonesian Journal of LAW and Justice* 1(4).
- Trioctavia, Jayanti, dkk. (2016). Peranan Pemimpin dalam Mengembangkan Budaya Organisasi (Studi Kaus Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Regonal Office. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAD)* 40(1).